

Sulitnya akses serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait obat berkualitas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan

Badira Kamelin

Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dira.kamelin@gmail.com

Kata Kunci:

Obat; Daerah Terpencil;
Kefarmasian

Keywords:

Drug; Remote Area;
Pharmacy

ABSTRAK

Kefarmasian memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada sejumlah isu terkait kefarmasian yang perlu mendapat perhatian di Indonesia. Salah satu isu utamanya yaitu akses dan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas serta edukasi terkait penggunaan suatu obat. Hal tersebut memegang peranan penting dalam rangkaian terapi pasien agar dapat mencapai keberhasilan terapi yaitu kesembuhan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan sulitnya akses dan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas serta edukasi terkait

penggunaan suatu obat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui studi pada berbagai pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanggulangan sulitnya akses dan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas serta edukasi terkait penggunaan suatu obat dapat perlu melibatkan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri kefarmasian, dan masyarakat melalui cara memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah DTPK, mendorong investasi dalam produksi obat-obatan generik berkualitas, meningkatkan regulasi obat, serta tentunya edukasi dan informasi oleh apoteker atau farmasis kepada masyarakat.

ABSTRACT

Pharmacy plays an important role in maintaining the health and welfare of society. However, there are still a number of pharmaceutical-related issues that need attention in Indonesia. One of the main issues is access to and availability of affordable and quality medicines as well as education related to the use of a drug. This plays an important role in a series of patient therapies in order to achieve therapeutic success, namely patient recovery. This study aims to find out how to overcome the difficulty of access and availability of affordable and quality medicines as well as education related to the use of a drug. This research uses a descriptive qualitative method with an approach through studies of various literature. Based on the research results, it is known that overcoming the difficulty of access and availability of affordable and quality drugs as well as education related to the use of a drug can need to be involved collaborative efforts from the government, the pharmaceutical industry, and the community through strengthening health infrastructure in DTPK areas, encouraging investment in the production of quality generic drugs, increasing drug regulation, and of course education and information by pharmacists or pharmacists to the public.

Pendahuluan

Kefarmasian memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada sejumlah isu terkait kefarmasian yang perlu mendapat perhatian di Indonesia. Salah satu isu utamanya yaitu sulitnya akses dan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas serta edukasi terkait penggunaan suatu obat. Hal tersebut memegang peranan penting dalam rangkaian terapi pasien agar dapat mencapai keberhasilan terapi yaitu kesembuhan pasien. Tentunya hal ini menjadi PR



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bagi para farmasis untuk mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut. Utamanya pada masyarakat daerah pinggiran atau terpencil di Indonesia yang akses terhadap pelayanan kesehatannya terutama pelayanan kefarmasian cenderung sulit (Yulianingsih dkk, 2023).

Permasalahan tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Linardita Ferial (2023) yang menghasilkan data yaitu pada beberapa puskesmas di DTPK provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, rata-rata puskesmas sampel memiliki 0,89 dokter umum, 0,39 dokter gigi, 14 perawat, dan 17 bidan (Wahyuni dan Ferial, 2023). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak semua puskesmas memiliki dokter tetap. Terdapat lima Puskesmas (tiga di NTT dan dua di Sulawesi Selatan) yang tidak memiliki dokter umum tetap dan 11 yang tidak memiliki dokter gigi tetap. Hal ini masih jauh dari standar minimal SDM Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 (75/2014) tentang Puskesmas, yang menyatakan bahwa untuk daerah terpencil dan sangat terpencil harus ada satu dokter umum. di puskesmas rawat jalan, dua dokter umum di puskesmas rawat inap, dan satu dokter gigi di setiap puskesmas rawat jalan (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b). Ketiadaan dokter pada gilirannya dapat membuat masyarakat enggan mencari pengobatan di pusat-pusat kesehatan primer, mengingat bahwa menjangkau pusat-pusat tersebut tidak mudah bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tinggal jauh. Standar minimum juga mensyaratkan minimal lima perawat dan empat bidan di puskesmas rawat jalan, dan delapan perawat dan tujuh bidan di puskesmas rawat inap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b).

Demikian pula, ketidaktersediaan apoteker dan teknisi lab di pusat kesehatan primer yang menandakan bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan resep dokter atau melakukan tes darah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, harus terdapat Tenaga Laboratorium, Apoteker, Ahli Kesehatan Masyarakat, dan Ahli Kesehatan Lingkungan di setiap Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap dan dua ahli gizi di setiap puskesmas rawat inap. Tentu keadaan yang ada di daerah tersebut tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat kesulitan menemukan obat berkualitas sehingga kualitas kesehatan mereka tidak begitu baik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b).

Pembahasan

Penanganan isu sulitnya akses dan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas serta edukasi terkait penggunaan suatu obat juga tentunya perlu melibatkan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri kefarmasian, dan masyarakat untuk mengatasi isu-isu ini secara efektif. Swamedikasi (self-medication) juga merupakan alternative edukasi kesehatan bagi masyarakat (Rahmadinata et.al., 2023). Dalam hal penanganan permasalahan ini, tentunya diperlukan peran besar seorang farmasis. Tak hanya keilmuannya, penanganan ini tentunya membutuhkan jiwa sosial yang cukup tinggi dalam diri seorang farmasis (Andayani dan Satibi, 2016) .

Upaya untuk mengatasi kesulitan akses obat ini dapat dimulai dari memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah DTPK. Dengan infrastuktur kesehatan yang baik, akan mempermudah akses untuk mendapat obat-obatan berkualitas. Hal ini meliputi

peningkatan jumlah rumah sakit dan klinik, perbaikan fasilitas kesehatan yang sudah ada, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan. Dalam hal ini utamanya apoteker yang bertugas memberikan edukasi terkait obat pada pasien. Dan yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan distribusi obat ke daerah terpencil. Daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses obat berkualitas. Upaya untuk meningkatkan distribusi obat ke daerah terpencil dapat dilakukan dengan membuka pusat distribusi di daerah tersebut atau mengembangkan sistem pengiriman obat yang efektif. Selain itu, penggunaan teknologi seperti drone dapat membantu mengirimkan obat-obatan ke daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah dapat memberikan anggaran yang lebih besar untuk memperkuat infrastruktur kesehatan (Orda et.al., 2016)

Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu mendorong investasi dalam produksi obat-obatan generik berkualitas. Obat generik adalah obat yang memiliki bahan aktif yang sama dengan obat paten, tetapi diproduksi oleh perusahaan lain setelah masa paten berakhir. Obat generik biasanya lebih terjangkau dan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap obat berkualitas. Pemerintah dapat mendorong produksi obat generik dengan memberikan insentif dan fasilitas produksi (WHO, 2019). Hal selanjutnya yang tentu tak boleh luput diperhatikan adalah meningkatkan regulasi obat. Regulasi obat yang ketat dapat membantu meningkatkan kualitas obat yang tersedia di pasar. Pemerintah dapat memperketat regulasi obat dan melakukan pengawasan terhadap peredaran obat secara ketat. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan farmasi yang memenuhi standar kualitas tertentu (Salundik dan Mentayani, 2021).

Setelah dilakukan upaya-upaya tersebut, edukasi dan informasi oleh apoteker atau farmasis kepada masyarakat selanjutnya menjadi penentu keberhasilan penanganan isu ini. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang bagaimana suatu obat bekerja, kapan harus menggunakannya, dan pentingnya mengikuti instruksi dokter. Kampanye edukasi tentang penggunaan obat yang aman dan berkualitas harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan (Shinta dkk, 2017). Dengan menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan, diharapkan permasalahan terkait akses serta edukasi obat yang berkualitas pada masyarakat DTPK dapat teratasi. Dan dengan hal tersebut, tentunya dapat meningkatkan eksistensi apoteker atau farmasis lainnya di masyarakat (Ratri dan Puspitasari, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Penanggulangan sulitnya akses dan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas serta edukasi terkait penggunaan suatu obat dapat perlu melibatkan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri kefarmasian, dan masyarakat melalui cara memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah DTPK, mendorong investasi dalam produksi obat-obatan generik berkualitas, meningkatkan regulasi obat, serta tentunya edukasi dan informasi oleh apoteker atau farmasis kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andayani, T. M. & Satibi, S. (2016). *Pharmacy Practice in Indonesia* (In A. I. Fathelrahman, Ahmed Ibrahim; Ibrahim, Mohamed Izham Mohamed; Wertheimer. 1st Edition). London: Elsevier Inc.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b. Standar Ketenagaan Puskesmas Permenkes no. 75 tahun 2014. Jakarta
- Orda, Ulrich et. al. 2016. Quality Improvement Report Building a sustainable workforce in a rural and remote health service: A comprehensive and innovative Rural Generalist training approach. *AJRH*. Page 1-4.
- Rahmadinata, Yusril Dwi, Cholina, Safira Isnaini and Hajar, Sugihantoro (2023) Pengaruh edukasi swamedikasi obat analgesik menggunakan metode video edukasi terhadap tingkat pengetahuan calon jemaah haji Kecamatan Batu, Kota Batu. Project Report. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/17022/>
- Ratri, D.M.N., dan Puspitasari A.D. 2017. Pengetahuan Siswa Lulusan SMA Terhadap Tugas Apoteker di Berbagai Bidang Kerja Kefarmasian. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*. Volume 4, nomor 2: 84-90
- Salundik dan Mentayani, I. 2021. PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga*. Volume 6, nomor 1: 39-55.
- Shinta, R., Hanggara, L., Gibran, N. C., & Kusuma, A. M. 2017. Pengaruh Keberadaan Apoteker terhadap Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*. Volume 363, nomor 1: 67-76.
- Wahyuni, S., dan Ferial, L. 2023. PEMERIKSAAN PUSKESMAS DI DAERAH TERPENCIL TERHADAP FASILITAS KESEHATAN. *JOUBAHS*. Volume 3, nomor 1: 91-108.
- WHO. 2019. *WHO Policy Perspectives on Medicines: Promoting the Use of Generic Medicines*. Retrieved from <https://www.who.int/medicines/services/inn/genericmedspolicyperspectives/en/>
- Yulianingsih, P.D., dkk. 2023. Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian Dengan Penggunaan Obat Di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. *Jurnal Pharmacia Mandala Waluya*. Volume 2, nomor 1: 18-27.